

**EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

EVAN SARLI RAKASIWI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Evan Sarli Rakasiwi

Tugas BPBD menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat dari bencana alam maupun bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri, seringkali tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, faktor manusia dan pendukung lainnya (alat-alat, sarana dan prasarana) menjadi masalah utama yang sering timbul. Selain itu komunikasi dari suatu lembaga pemerintah dengan masyarakat juga menjadi masalah yang dapat menghambat BPBD menyelesaikan tugasnya secara Efektif. Suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan..

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan Informannya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam pelaksanaan kegiatan serta implementasi program kerja yang ada di BPBD kota Bandar Lampung dapat dikatakan Efektif, walaupun dengan anggaran serta sarana dan prasarana yang minim, Namun pihak BPBD Kota Bandar Lampung terus memaksimalkan kinerjanya baik dari layanan (jasa) yang diberikan kepada masyarakat maupun pembangunan fisik yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : BPBD, Efektifitas

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY PERFORMANCE (BPBD) BANDAR LAMPUNG IN FLOOD DISASTER IN THE CITY BANDAR LAMPUNG

By

Evan Sarli Rakasiwi

The task of BPBD concerns the safety and security of the community from natural disasters and disasters made by the man himself, often can not be done properly, human factors and other supporters (tools, facilities and infrastructure) become the main problem that often arise. In addition communication from a government agency with the community is also a problem that can prevent BPBD completing its task effectively. An organization, program and activities are said to be effective if the desired goals or objectives can be achieved in accordance with the plan and can have the desired impact, outcome or benefit

The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. This research uses purposive sampling technique in determining the informant. While the data collection techniques used are by interview and documentation. While data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion.

In the implementation of activities and implementation of existing work programs in the city of Bandar Lampung BPBD can be said Effective, although the budget and facilities and infrastructure are minimal, but the BPBD Bandar Lampung City continues to maximize its performance both from services (services) provided to the community and physical development conducted by BPBD Kota Bandar Lampung associated with disaster management activities in Bandar Lampung City.

Keywords: BPBD, Effectiveness

**EFEKTIFITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh
Evan Sarli Rakasiwi

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

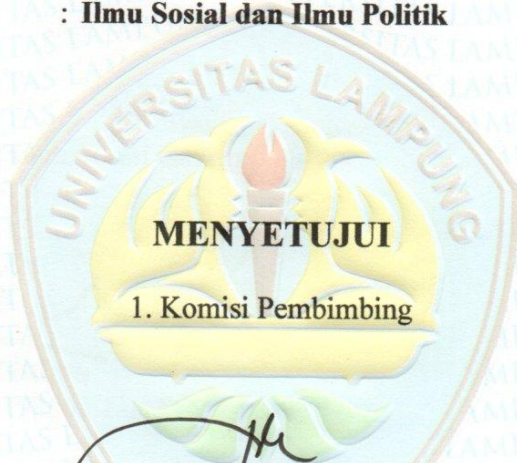
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS KINERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Evan Sarli Rakasiwi**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021045**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

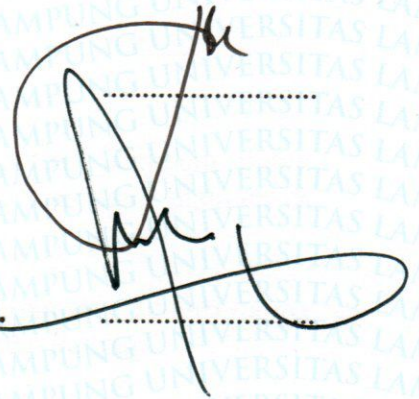
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**

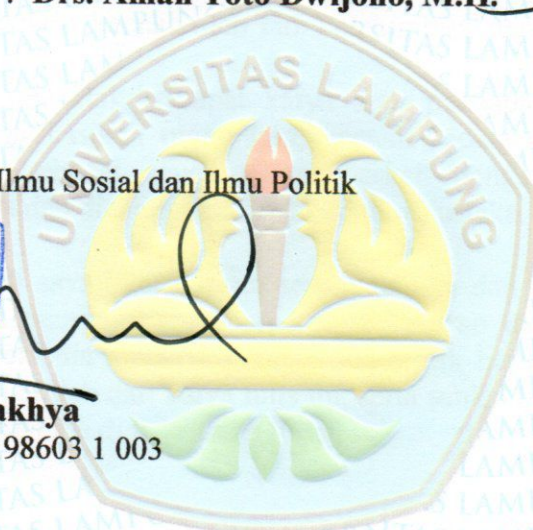


Penguji : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **17 Januari 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali oleh Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, Januari 2018
Yang membuat pernyataan



Evan Sarli Rakasiwi
1216021045

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Blambangan Umpu pada tanggal 20 Juli 1994, sebagai putra pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ujang Suhendra dan Ibu Evi Nopiya.

Penulis tercatat pertama kali bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK) Islam RA Kartini Jakarta Timur yang diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 06 pagi Jakarta Timur dari kelas 1 sampai kelas 4, baru kemudian pada tahun 2004 penulis pindah ke Bandar Lampung dan bersekolah di SD Negeri 2 Rajabasa, diselesaikan pada tahun 2006, Setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar penulis meneruskan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 22 Bandar Lampung dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Penulis sempat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Karate dan pernah menjadi juara 3 dalam lomba karate di kelas kata' beregu putra yang mengikutsertakan kontingen dari Sumatra bagian selatan, Jakarta dan Banten.

Pada tahun 2009 sampai tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Bandar Lampung dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Selanjutnya pada tahun 2012 penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur SNMPTN dan lulus pada tahun 2018.

Pada masa akhir perkuliahan, penulis bekerja menjadi staff kesekretariatan Badan Akreditasi PAUD dan PNF yang mengkhususkan akreditasi pada lembaga pendidikan non formal sejak tahun 2016, disini penulis mendapatkan pengalaman yang tidak sedikit, hingga pada akhir tahun 2017 BAP PAUD dan PNF Lampung menerima penghargaan sebagai BAP terbaik se Indonesia dalam kategori Kinerja Terbaik. Dan setelah sekian lama penulis berlutut dengan Pekerjaannya di masa kuliah. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsinya pada 17 Januari 2018.

MOTTO

Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan, tetapi jika kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya.

Hidup hanya sekali, maksimalkan waktu yang ada mulai dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari. Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali. Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.

Jadikan cobaan yang ada di dalam hidup layaknya ampas yang kian lama akan memperhalus dan membuat kita menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi.

(Evan Sarli Rakasiwi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, telah engkau Ridhai Ya Allah langkah hamba-MU,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan

Dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Ayahanda Ujang Suhendra dan Ibunda Evi Nopiya, sebagai tanda bakti, hormat
dan cintaku. Terima kasih atas do'a dan restu yang telah diberikan.
Semoga karya sederhana ini, dapat membuat bangga dan memberikan
kebahagiaan atas segala jerih payah yang telah dikerjakan.

Terima kasih untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan
Jannah dari Allah S.W.T.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kekuatan lahir dan bathin kepada Penulis. karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat masukan, bantuan, dorongan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtuaku, Ayah dan Ibu tercinta Bapak Ujang Suhendra dan Ibu Evi Nopiya yang merupakan inspirasi terbesar penulis, tidak akan terbayangkan betapa bangganya aku mempunyai dua orang tua hebat seperti kalian. Terimakasih telah membesarkanku menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. Maaf belum bisa menjadi kebanggaan ayah dan ibu, tapi percayalah tidak pernah surut tekad ini untuk membahagiakan dan membanggakan kalian. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilanku dimasa depan.

2. Untuk ketiga adik-adikku, Rizki Wulandari, Yoan Elang Perkasa dan Maya Sophia Khoirunisa yang selalu mendukung lewat doa.
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono , M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fisip Unila
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
7. Seluruh Dosen pengajar yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Ketua, Anggota beserta Personilnya yang sabar serta ramah dalam memberikan Informasi kepada penulis
9. Bapak Lurah serta warga kelurahan Kota Karang yang berkenan membantu dalam memberikan masukan dan informasi
10. Teman-teman kesekretariatan BAP PAUD dan PNF Provinsi Lampung beserta Bapak, Ibu anggota yang senantiasa menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini

11. Sahabat-sahabat di kampus, Rizki Pranata, S.IP., Dedek Renaldo, S.IP., Guntur, Wahid, Khoirul, Abdi, Budi, Dwi, Yoga S, Bagas yang selalu mendukung, menghibur dan menyemangati dikala susah.
12. Kawan-kawan dari kelas genap, Melyansyah, S.IP. Rangga, Nekroma, and the genk nya.
13. Sahabat-sahabat SMK N 2 Bandar lampung, Sarjono, Tri, Angga, Bambang, Hilman, candra, ilham, topik, fikri yang selalu nyambung dalam memberikan masukan serta kritikan
14. Sepupuku Siti Javani Ghandi yang selalu mendukung hingga skripsi ini bisa selesai
15. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis
16. Dan untuk orang yang paling kusayangi, wanita yang selalu memberikan inspirasi, semangat serta motivasi, Helda Yuni. A.Md. tiada pernah ada kata yang dapat membuatku bersyukur karena ada sosok wanita sebaik kamu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 17 Januari 2018

Penulis

Evan Sarli Rakasiwi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. KONSEP EFEKTIVITAS	
1. Pengertian Efektifitas	10
2. Karakteristik Efektivitas Organisasi.....	13
3. Indikator Efektivitas	16
4. Pengukuran Efektivitas	17
5. Masalah Dalam Pengukuran Efektivitas	19
6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	22
 B. TINJAUAN TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	 26
 C. KONSEP BENCANA	
1. Pengertian Bencana	28
2. Banjir dan Jenisnya	31
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Banjir.....	33
4. Penanggulangan Resiko Banjir	34
 D. PROGRAM KERJA BPBD KOTA BANDAR LAMPUNG	
1. Pengembangan Kelembagaan Dan Kinerja Aparat/Sdm.....	36
2. Pokok – Pokok Program / Pengembangan Pemanfaatan Lingkungan Yang Kondusif.....	40
 E. KERANGKA PIKIR	 46

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	50
B. Fokus Penelitian	51
C. Lokasi penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Pengolahan Data	57
G. Teknik Analisis Data.....	58

IV. GAMBARAN UMUM

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung	62
B. Kota Bandar Lampung	74
C. Kelurahan Kota Karang.....	76

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan	78
B. Hasil Penelitian	80
C. Pembahasan.....	110

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	124
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Keefektifan Organisasi	15
2. Faktor-faktor yang menunjang Efektifitas	23
3. Tingkat golongan unsur pelaksana BPBD	71
4. Jumlah penduduk kelurahan Kota Karang tahun 2016	77
5. Data peralatan dan mesin yang dimiliki BPBD Bandar Lampung	120

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam antarlain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.

Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tidak dapat diprediksi dan adanya pasang naik air laut, hingga banjir yang disebabkan oleh manusia seperti membangun permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan hingga membuang sampah tidak pada tempatnya dan mengganggu sistem drainase. Selama ini penanggulangan bencana hanya dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,

yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*) (Depkominfo, 2007: 12).

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Oleh karena itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang lebih dan tujuan untuk melindungi masyarakatnya haruslah membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat agar bencana yang terjadi dapat diatasi, salah satu diantaranya yaitu dengan membuat lembaga, badan atau organisasi yang diberikan wewenang lebih oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah banjir dengan lebih spesifik.

Lembaga yang dibuat pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB dan merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang - Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri.

Pasal 18 di dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ Kotamadya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Tahun 2010 Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk BPBD sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010. Dalam menjalankan tugasnya, BPBD Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok dan Fungsi yang mengatur kegiatan serta tindakan yang harus dilakukan. Tugas BPBD menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat seringkali tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, faktor manusia dan pendukung lainnya (alat-alat, sarana dan prasarana) menjadi masalah utama yang sering timbul. Selain itu komunikasi dari suatu lembaga pemerintah dengan masyarakat juga menjadi masalah yang dapat menghambat BPBD menyelesaikan tugasnya secara optimal.

Enam tahun semenjak pembentukan BPBD Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung harus menghadapi banjir bandang di awal Tahun 2016, banjir bandang kali ini tepatnya berada di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, serta Kelurahan Gedung Pakuon dan Pesawahan, Kecamatan Teluk

Betung Selatan, "Banjir ini terjadi akibat kiriman dari daerah Pesawaran. Banjir juga hanya terjadi di daerah aliran sungai," kata nanik salah seorang warga Kelurahan gedung pakuon yang menjadi korban banjir. Selain itu, banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan adalah yang terparah semenjak 20 tahun terakhir, hal ini diperkuat oleh pengakuan Camat Telukbetung Selatan, Yustam Effendi yang mengatakan bahwa banjir bandang seperti ini memang pernah terjadi, namun kejadiannya sudah lama sekali, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. (sumber: Lampung.tribunnews.com/2016/03/15/).

Selain itu banjir dengan ketinggian semata kaki juga sempat merendam rumah warga di Jalan Sultan Haji Bandar Lampung, banjir kali ini lebih disebabkan oleh keadaan kali yang semakin sempit akibat dari minimnya perawatan sehingga air di kali menjadi meluap, menurut salah seorang korban banjir HM Firdaus yang dilansir duajurai.com hujan yang terjadi memang sangat intens, Meski durasi hujan tidak lama, air tetap merembes akibat aliran kali yang tidak lancar, menurut pantauan duajurai.com selain rumah keluarga besar HM Firdaus, luapan air juga menimpa sekitar 3 rumah di pinggir kali. (sumber: duajurai.com/2016/06/13/).

Empat hari berselang setelah peristiwa banjir di Jl Sultan Haji, banjir kembali menerjang Kota Bandar Lampung, kali ini banjir menerjang belasan rumah di Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara, ini merupakan banjir kedua yang terjadi dikawasan itu dalam tempo kurang dari sepekan, menurut Zuleha, warga Rt 2 lingkungan 1 Kelurahan Pengajaran mengatakan banjir kali

ini sudah terjadi dua kali dan selalu membawa lumpur yang mengganggu kebersihan dan kesehatan masyarakat (sumber: Tribun Lampung sabtu, 18 juni 2016). Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, sejumlah petugas BPBD Bandar Lampung diterjunkan ke lokasi banjir. Mereka membantu warga membersihkan sisa lumpur yang menutupi rumah warga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat Peran Vital BPBD Kota Bandar Lampung dalam upaya menangani bencana banjir yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini menjadi masalah yang sangat menarik untuk dibahas, sebab permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung masih sering terjadi, bahkan di kawasan Teluk Betung Selatan dan timur terjadi banjir yang di *claim* menjadi banjir yang terparah semenjak 20 tahun terakhir, sehingga harus diakui, dengan dibentuknya BPBD, tidak serta merta penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak aspek penghambat tidak efektifnya suatu kebijakan ataupun kegiatan seperti minimnya sumberdaya terlatih serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Lembaga atau Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu (Malayu, 2003:121). Lembaga akan mencapai tujuannya jika dikelola dengan baik hanya saja keberhasilan untuk mewujudkan suatu lembaga yang baik, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi hanya ditentukan oleh keberhasilan penerapan prinsip-prinsip lembaga, akan tetapi terdapat faktor lain yang juga ikut menentukan keberhasilan lembaga.

Memang benar bahwa lembaga tidak pernah statik dan tidak pula bergerak pada kondisi kekosongan. Tuntutan mewujutkan perubahan dapat timbul dari dua sumber, yaitu dari dalam lembaga itu sendiri dan lingkungannya. Dengan perkataan lain, setiap lembaga harus peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa lembaga tersebut berinteraksi dan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Menurut Harbani Pasolong (2007:4) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program

dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

Selanjutnya, untuk memperkuat penelitian ini penulis menggunakan referensi penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Efektifitas BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di kota Bandar Lampung, seperti penelitian yang dilakukan oleh SARTIKA DEWI pada tahun 2015 dengan judul penelitian Efektivitas Kerja Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) Dalam Penanganan Bencana Di Kota Tanjung pinang serta penelitian yang dilakukan oleh Zakia Lubis pada tahun 2010 dengan judul penelitian Strategi komunikasi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) provinsi lampung dalam penanggulangan banjir.

Berdasarkan kedua penelitian yang dijadikan sumber referensi oleh penulis, dapat dilihat beberapa perbedaan yang menonjol mulai dari objek, tempat, metode penelitian yang digunakan, teori yang digunakan dalam penelitian serta tujuan penelitian, jika pada penelitian terdahulu yang dibuat oleh SARTIKA DEWI pada tahun 2015 dengan judul penelitian Efektivitas Kerja Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) Dalam Penanganan Bencana Di Kota Tanjung pinang, yang menjadi objek penelitian adalah BASARNAS, serta tempat yang menjadi lokasi penelitian juga berbeda yaitu di tanjung pinang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zakia Lubis pada tahun 2010 dengan judul penelitian Strategi komunikasi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) provinsi lampung dalam penanggulangan banjir, juga memiliki perbedaan dari yang penulis buat, dari objeknya, penelitian yang dilakukan oleh zakia lubis ditujukan kepada BPBD Provinsi sedangkan yang penulis buat memilih objek BPBD Kota Bandar Lampung, kemudian dari teori yang digunakan, penelitian terdahulu zakia lubis menggunakan teori komunikasi dalam penelitiannya, namun penulis menggunakan teori efektifitas sehingga perbedaan teori ini menjadi pembeda yang utama penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan program-program kerja yang telah dibuat baik oleh pemerintah maupun BPBD sendiri, serta untuk mengetahui tindakan apa yang diperlukan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana alam di Kota Bandar Lampung, Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai Efektivitas BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Pemerintahan khususnya tentang Efektivitas Lembaga milik pemerintah
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, serta masukan-masukan kepada Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung mengenai Efektivitas kerja Aparatur Publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dapat diselesaikan tepat waktu dengan sempurna dan target telah dicapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Harbani Pasolong (2007: 145) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.

Efektivitas juga merupakan upaya yang menuju efektif dengan menggunakan kemampuan sarana dan prasarana yang ada sehingga tercapainya tujuan yang hendak dicapai, menurut Handoko (2007: 7) menyebutkan efektivitas sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu Robbins dan Caulter (2010: 8) mengatakan efektivitas sering kali disebut sebagai mengerjakan hal yang tepat yaitu, menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai sasarannya.

Sedangkan Menurut Andrian (2001: 12), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada.

Adapun pengertian efektifitas Menurut Hasibuan (2002: 120), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien. Steers menilai efektivitas sebagai “ukuran seberapa jauh suatu tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang layak”.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, menurut penulis apabila pencapaian tujuan-tujuan dari kebijakana atau program semakin besar maka semakin besar pula efektivitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian yang besar daripada kebijakan maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat efektivitasnya, yaitu sejauh mana pelaksanaan kebijakan atau program itu mencapai tujuan atau dengan kata lain pelaksanaan kebijakan atau program itu mampu mendukung tercapainya tujuan dari diadakannya.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut, sebab efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa literatur ilmiah mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

2. Karakteristik Efektivitas Organisasi

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai penggambaran siklus input dan proses output. Gibson mengemukakan kriteria efektivitas organisasi yang terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu :

a. Produksi

Merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama dari organisasi. Ukuran dari produksi mencakup tentang keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

b. Efisiensi

Merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya perorang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

c. Kepuasan

Merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggota-anggota perusahaan tersebut. Ukuran dari kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan dan sebagainya.

d. adaptasi

Merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan para pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

e. Kelangsungan hidup

Merupakan kriteria efektivitas mengacu pada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam usaha memperbesar kapasitas dan potensinya untuk dapat berkembang. Indikator-indikator yang digunakan ialah produktivitas, efisiensi, kecelakaan, pergantian pegawai, absensi, kualitas, tingkat keuntungan, moral, dan kepuasan karyawan atau anggota perusahaan.

Stephen P. Robbins (1994 : 55) mengungkapkan kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut :

Tabel 2 : Kriteria Keefektifan Organisasi

No.	Kriteria	No	Kriteria
1	2	3	4
1.	Keefektifan keseluruhan	17.	Internalisasi tujuan organisasi
2.	Produktivitas	18.	Konsensus tentang tujuan
3.	Efisiensi	19.	Keterampilan interpersonal
4.	Laba	20.	manajerial
5.	Kualitas	21.	Keterampilan manajerial
6.	Kecelakaan	22.	Manajemen informasi dan
7.	Pertumbuhan	23.	komunikasi
8.	Kemangkiran	24.	Kesiapan

1	2	3	4
9.	Pergantian pegawai	25.	Pemanfaatan lingkungan
10.	Kepuasan kerja	26.	Evaluasi pihak luar
11.	Motivasi	27.	Stabilitas
12.	Moral/semangat kerja		Nilai sumber daya manusia
13.	Kontrol	28.	Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama
14.	Konflik solidaritas		Penekanan pada pelatihan dan pengembangan
15.	Perencanaandan	29.	Penekanan pada performa
16.	pencapaian tujuan		
	Konsensus		

Sumber : Stephen P. Robbins, 1994: 5

3. Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Starawaji (2009) mengatakan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut (Price, 1972:15). Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memerhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif;

b. Pendekatan sumber (*System Resource Approach*)

Mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu

lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya.

c. Pendekatan proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan ini menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memerhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

4. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas akan menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Penerapan makna efektivitas untuk organisasi berarti tercapainya tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan yang telah diterapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut

Siagian (1985: 33-35), mengemukakan bahwa ukuran untuk mengetahui efektivitas suatu organisasi mencakup tentang :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, adanya tujuan yang jelas dan pasti yang telah ditetapkan dalam mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, lembaga atau badan pemerintahan diharapkan memiliki strategi yang tepat dan jelas dalam melaksanakan pemerintahan;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, pemerintah diharapkan mampu melakukan proses analisis yang tepat dalam melihat kondisi di masyarakat sehingga mampu merumuskan kebijakan yang matang dan sesuai dengan kondisi masyarakat;
- d. Perencanaan yang matang, perlu dibuat perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tidak merugikan kedua pihak, baik itu pihak masyarakat maupun pemerintah itu sendiri;
- e. Penyusunan program yang tepat, setelah adanya proses analisis yang tepat dan baik maka akan dibuatlah penyusunan program yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan melalui proses perencanaan yang tepat maka akan menghasilkan penyusunan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakatnya;

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, selain mekanisme kerja yang matang dan tepat yang telah dijelaskan tadi perlu juga didukung dengan sarana dan pra sarana kerja yang baik guna menunjang kegiatan pemerintahan yang baik;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Perlu adanya sistem pengawasan dan pengendalian dari pemerintahan daerah dan pemerintah pusat sehingga mampu memberikan kritik, saran dan informasi yang berguna dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

5. Masalah dalam Pengukuran Efektivitas

Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Seperti ada beberapa rancangan tentang memandang konsep ini dalam kerangka kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hanya kepada satu kriteria evaluasi (contoh, produktivitas).

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Adanya macam-macam output

Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektivitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk

dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya.

Efektivitas tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan suatu indikator atau efektivitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertai dengan efektivitas yang rendah pada sasaran lainnya. Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda-beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektivitas seringkali terpaksa dilakukan dengan memperhatikan bermacam-macam secara simultan. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektivitas pada setiap sasaran yang dimilikinya.

Selanjutnya hal lain yang sering dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan criteria dalam pengukuran efektivitas seperti yang dikemukakan oleh R.M Steers (1985: 546) bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran efektivitas adalah :

1. Adaptabilitas dan Fleksibilitas
2. Produktifitas
3. Keberhasilan
4. Keterbukaan dalam berkomunikasi
5. Keberhasilan pencapaian program
6. Pengembangan program

b. Subjektifitas dalam penelitian

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran. Hal ini terjadi karena sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan. Untuk itu ada baiknya bila meninjau pendapat G.W England, bahwa perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya dari dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau masyarakat, seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas.

Untuk sasaran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsure subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Richard M Steers yaitu bahwa lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap informasi lembaga dan menentukan tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai (Steers, 1985:558).

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Kerangka kerja yang dipakai disini mengidentifikasi empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas,
- b. Struktur organisasi.
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
- d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers (1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas sebagai berikut:

Tabel 3: Faktor-faktor Yang Menunjang Efektivitas

<p>Karakteristik Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Struktur <ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi • Spesialisasi • Formulasi • Rentang kendali • Besarnya organisasi ➤ Teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Besarnya Unit Kerja • Operasi • Bahan • Pengatahuan 	<p>Karakteristik Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ekstern <ul style="list-style-type: none"> • Kekomplekan • Kestabilan • Ketidakstabilan ➤ Intern <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pada karya • Pekerja sentries • Orientasi pada imbalan hukum • Keamanan versus resiko • Keterbukaan versus pertahanan
<p>Karakteristik Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterkaitan pada organisasi • Ketertarikan • Kemantapan kerja • Keikatan <p>Prestasi Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivasi tujuan dan keterbukaan • Kemampuan • Kejelasan Peran 	<p>Kebijakan dan praktek manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan tujuan strategis • Pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya • Penciptaan lingkungan prestasi • Proses komunikasi • Kepemimpinan dan pengambilan keputusan • Inovasi dan adaptasi organisasi

Sumber: Richard M Steers (1985:8)

Di bawah ini penulis menguraikan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:8):

- a. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- b. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- c. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

- d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis simpulkan efektivitas adalah tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau program yang telah dilakukan dan ditetapkan secara baik, optimal, dan tepat sasaran. Bila dikaitkan dengan tema penelitian ini tentang Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung “, maka efektivitas yang dimaksud ialah terlaksananya rencana dan tujuan dari program kerja BPBD dalam menangani bencana banjir secara tepat, cepat dan benar serta transparan.

B. Tinjauan Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Di dalam pelaksanaannya BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab penuh kepada Gubernur. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana
 - a. Dalam situasi tidak terjadi bencana.
 - 1) Perencanaan penanggulangan bencana.
 - 2) Pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan.
 - 3) Persyaratan analisis risiko bencana.
 - 4) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan.
 - 5) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) Kesiapsiagaan
 - 2) Peringatan dini
 - 3) Mitigasi bencana.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana.
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas :
 - a. Rehabilitasi, penyelenggaraan rehabilitasi di wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan

budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi pelayanan publik.

- b. Rekonstruksi, meliputi kegiatan: pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

C. Konsep Bencana

1. Pengertian Bencana

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwa potensi penyebab bencana di wilayah Kota Bandar Lampung dapat berasal dari bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan karena aktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.

Sedangkan bencana non-alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Sementara itu bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat.

Berbicara mengenai bencana, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang tidak terlepas pula dari pembahasan yaitu antara lain mengenai :

- a. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk terlibat secara aktif dalam sebelum, selama dan setelah bencana.

- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
- c. Kegiatan pencegahan bencana, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana
- d. Kesiapsiagaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
- e. Mitigasi, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- f. Tanggap darurat, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- g. Resiko bencana, merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;

- h. Rehabilitasi, merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- i. Rekonstruksi, merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

2. Banjir dan Jenisnya

Berdasarkan Undang - undang No.24 Tahun 2007, bencana banjir didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non- alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya suatu daerah, terkena banjir dengan didasarkan pada faktor - faktor alam yang mempengaruhi banjir antara lain faktor meteorologi (intensitas

curah hujan, distribusi curah hujan, frekuensi dan lamanya hujan berlangsung) dan karakteristik daerah aliran sungai (kemiringan lahan/kelerengan, ketinggian lahan, testur tanah dan penggunaan lahan) (suherlan, 2001: 14).

Istilah banjir terkadang bagi sebagian orang disamakan dengan genangan, sehingga penyampaian informasi terhadap bencana banjir di suatu wilayah menjadi kurang akurat. Genangan adalah luapan air yang hanya terjadi dalam hitungan jam setelah hujan mulai turun. Genangan terjadi akibat meluapnya air hujan pada saluran pembuangan sehingga menyebabkan air terkumpul dan tertahan pada suatu wilayah dengan tinggi muka air 5 hingga >20 cm. Sedangkan banjir adalah meluapnya air hujan dengan debit besar yang tertahan pada suatu wilayah yang rendah dengan tinggi muka air 30 hingga > 200 cm.

Menurut M. Syahril (2009), Kategori atau jenis banjir terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran permukaan dan berdasarkan mekanisme terjadinya banjir.

a. Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya :

- 1) Banjir kiriman (banjir bandang) : Banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan didaerah hulu sungai.
- 2) Banjir lokal : banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang melebihi kapasitas pembuangan disuatu wilayah.

- b. Berdasarkan mekanisme banjir terdiri atas 2 jenis yaitu :
 - 1) Regular Flood : Banjir yang diakibatkan oleh hujan
 - 2) Irregular Flood : Banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya bendungan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Banjir

- a. Hujan, dimana dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya hujan selama sehari - hari.
- b. Erosi tanah, dimana menyisakan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras diatas permukaan tanah tanpa terjadi resapan.
- c. Buruknya penanganan sampah yaitu menyumbatnya saluran-saluran air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.
- d. Pembangunan tempat pemukiman dimana tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya serap air hujan. Pembangunan tempat pemukiman dapat menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat dibanding tanah terbuka yang biasanya mempunyai daya serap tinggi.
- e. Bendungan dan saluran air yang rusak dimana menyebabkan banjir terutama pada saat hujan deras yang panjang.
- f. Keadaan tanah dan tanaman dimana tanah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai daya serap air yang besar.

- g. Di daerah bebatuan dimana daya serap air sangat kurang sehingga dapat menyebabkan banjir kiriman atau banjir bandang. (IDEP, 2007: 43)

Banjir yang terjadi dapat menimbulkan beberapa kerugian (Eko, 2003: 19), diantaranya adalah:

1. Bangunan akan rusak atau hancur akibat daya terjang air banjir, terseret arus, terkikis genangan air, longsornya tanah di seputar atau di bawah pondasi.
2. Hilangnya harta benda dan korban nyawa.
3. Rusaknya tanaman pangan karena genangan air.
4. Pencemaran tanah dan air karena arus air membawa lumpur, minyak dan bahan- bahan lainnya.

4. Penanggulangan Resiko Banjir

Menurut Abhas (2012: 43), Pentingnya memahami suatu bencana khususnya bencana banjir di wilayah perkotaan merupakan langkah awal dalam mengurangi kerugian dari segala aspek. Berdasarkan prinsip pengolahan resiko banjir terdiri atas 12 tahapan, yaitu :

- a. Memahami jenis, sumber, aset- aset yang ter ekspose dan kerentanan banjir
- b. Rancangan untuk pengolahan banjir harus dapat menyesuaikan dengan perubahan dan ketidakpastian di masa depan.

- c. Urbanisasi yang berjalan cepat membutuhkan pengolahan resiko banjir secara terintegrasi dengan rancangan Kota rutin dan tata laksana.
- d. Strategi terintegrasi membutuhkan penggunaan tindakan- tindakan struktural dan non - struktural dan cara pengukuran yang tepat untuk mendapatkan hasil yang seimbang secara tepat.
- e. Tindakan- tindakan struktural dengan rekayasa ting gi dapat menyebabkan transfer resiko di hilir dan di hulu.
- f. Kemungkinan untuk mentiadakan risiko banjir secara keseluruhan adalah mustahil
- g. Banyak tindakan pengolahan banjir memiliki keuntungan berganda di atas peran mereka mengelola banjir
- h. Sangat penting untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekologis secara lebih luas dalam pembiayaan pengolahan banjir.
- i. Kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk konstruksi dan pengolahan program - program risiko banjir sangat perlu.
- j. Implementasi tindakan - tindakan pengolahan risiko banjir memerlukan kerjasama dari para pemangku kepentingan.
- k. Perlu adanya komunikasi yang berlangsung secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat kesiapan.
- l. Rencana pemulihan secara cepat setelah terjadi banjir dan gunakan proses pemulihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Pengelolaan resiko banjir khususnya perkotaan merupakan intervensi multi disiplin dan multi sektoral yang jatuh pada tanggung jawab dari keragaman badan - badan pemerintahan dan non pemerintahan. Berlandaskan tindakan-tindakan pengelolaan yang mengacu pada kedekatan spasial, dapat memudahkan otoritas lokal dalam mengambil keputusan yang tepat dan terintegrasi.

D. Program Kerja BPBD Kota Bandar Lampung

Untuk mencapai tujuan organisasi, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Sasaran/target program dimaksud dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi (*Action Plan*) yang dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Tahunan pada rapat kerja Penanggulangan Bencana Tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja (RKA) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan.

Sasaran atau target serta program Rencana Startegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Bandar Lampung adalah meliputi

a. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KINERJA APARAT/SDM

1) Penataan Kelembagaan

Dengan diterapkannya Otonomi Daerah, maka untuk efektifitas, efisiensi dan optimalisasi peran dan fungsi BPBD, maka penataan kelembagaan dengan struktur yang baru perlu diterapkan sesuai dengan peranan dan

fungsinya masing-masing, dengan tetap memperhatikan manfaat, tugas pokok dan fungsi BPBD yang ada. Penyusunan Job Discription yang jelas untuk setiap bagian/unsur dalam tubuh Organisasi yang baru harus jelas dan transparan, agar setiap aparat pelaksana tugas dapat menjalankannya dengan baik.

Penerapan prinsip akuntabilitas publik kepada setiap aparat BPBD dalam menjalankan tugasnya perlu dilakukan. Pengembangan kualitas individu aparat sebagai insan beragama dan mahluk sosial harus terinteraksi dan terefleksikan dalam setiap tindakan dan prilakunya dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Tujuan Program adalah Terbentuknya struktur organisasi BPBD yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip manajemen modern secara efisien, efektif dan optimal, serta meningkatkan etos kerja, integritas dan tanggung jawab moral kepada masyarakat luas. Serta Sasaran Program : Pemerintah Daerah, DPR

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan manajemen organisasi dapat berjalan dengan baik, apabila dapat dilakukan advokasi dan pembinaan kepada semua staf/tenaga yang ada tentang pentingnya Tugas Pokok dan fungsi. Dengan demikian dapat

diharapkan semua staf/tenaga dapat mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga setiap masalah yang timbul dapat dilakukan perbaikan – perbaikan sehingga tercipta suatu kinerja yang optimal.

Disisi lain dengan penguasaan akan tugas pokok dan fungsi serta implementasi kebijakan organisasi dapat menimbulkan rasa percaya diri dan menggairahkan semangat kerja, meningkatkan motivasi, etos kerja sehingga mendorong terlaksananya manajemen organisasi secara efisien, efektif dan optimal. Termasuk penempatan aparat pada suatu jabatan tertentu tidak berdasarkan atas Like and Dislike, tetapi berdasarkan atas kompetensi dan sikap perilaku yang baik, penguasaan akan tugas pokok dan tanggung jawab serta memiliki integritas, moral dan dedikasi yang tinggi (*The Right Man And The Right Pleace*).

Tujuan Program ini adalah Terbentuknya suatu sistem kerja, budaya dan lingkungan kerja yang serasi, saling menunjang dan mendukung serta kondisi yang kondusif dengan pemahaman, penghayatan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efisien, efektif dan optimal, serta meningkatkan mewujudkan sikap perilaku aparat yang berkualitas. Sedangkan sasaran programnya adalah Pejabat Struktural dan fungsional, petugas lapangan, serta seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang ada.

3) Ketenagaan/Sumber Daya Aparat

Dengan dibentuknya BBPBD dengan struktur Organisasinya, maka aspek ketenagaan merupakan salah satu sumber daya yang sangat menentukan peningkatan kinerja organisasi tersebut. Melihat dari jumlah, distribusi dan kualifikasi/strata tenaga yang dibutuhkan, maka secara ratio keadaan tersebut belum mencukupi. Sehubungan dengan keadaan tersebut, untuk meningkatkan kinerja organisasi, diperlukan kemampuan dan penerapan manajemen sumber daya manusia mulai dari tahap analisis kebutuhan tenaga, analisis jabatan dan urain kerja, stratafikasi/kualifikasi tenaga, requitmen, sistem balas jasa, pengembangan karier hingga sampai usia pensiun.

Dengan demikian diharapkan nantinya dapat dilakukan optimalisasi ketenagaan yang ada, yaitu dengan melaksanakan kegiatan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Tugas Belajar/pendidikan, penjenjangan karier, atau mengikutsertakan aparat dalam program pengembangan Skill/kemampuan melalui Pelatihan, Training, Seminar, Lokakarya, Desiminasi dll berkaitan dengan tugas pokok pemerintahan dan tugas pembangunan.

Tujuannya ialah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparat BPBD yang mampu menyusun dan menerapkan manajemen perencanaan kebutuhan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan tenaga sesuai kebutuhan, serta mampu menerapkan manajemen pengurangan resiko

bencana, cekatan dalam tindakan reaksi cepat, tanggap darurat dan pemulihan keadaan pasca bencana dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat terhadap resiko terkena bencana, dan sasaran Programnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Bandar Lampung, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.

4) Manajemen Organisasi

Membentuk pola, dan tatanan kerja yang mendukung terciptanya suatu suasana kerja yang harmonis, sinergis, dengan prinsip –prinsip manajemen modern, serta mampu menumbuhkan kreatifitas, inovatif dan mampu mengimplementasikan kemampuan dan ketrampilannya untuk kemajuan organisasi,tujuan program ini tercipta dan meningkatnya suatu sistem manajemen kerja yang produktif kondusif dan benar, yang dilakukan dalam upaya kemajuan dan peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan sasaran programnya adalah Seluruh staf/tenaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di kota Bandar Lampung.

b. POKOK – POKOK PROGRAM / PENGEMBANGAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF.

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia didalam usaha penanggulangan bencana, tercermin pada program – program pokok pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta pemulihan

keadaan pasca bencana, serta penerapan paradigma baru didalam usaha penanggulangan bencana melalui Manajemen Pengurangan Resiko Bencana dengan mengatur, mengendalikan dan memanfaatkan potensi lokal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program tersebut antara lain :

- 1) Program pencegahan dan Kesiapsiagaan : Melakukan pembinaan dan penataan penyusunan pembinaan dan penataan sistem database kebencanaan, menyiapkan peta daerah rawan bencana. yang akurat dan dapat memberikan gambar yang jelas tentang lokasi yang rawan terhadap resiko bencana. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para perencana untuk membuat usulan program pencegahan dan mitigasi bencana. Mengupayakan target/sasaran 100 % melalui implementasi pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan, antara lain

- a) Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana

Dimaksudkan untuk menyiapkan prosedur tetap dan panduan yang menjadi acuan didalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana didalam wilayah kabupaten Enrekang. Dengan adanya aturan ini maka proses penanggulangan bencana oleh unit terkait akan lebih sinergi dan terarah, sehingga afektifitas dan efisiensi akan lebih baik. Sasaran Program ini adalah Tersedianya Prosedur tetap pengulangan bencana, komando, tanggap darurat, pemberian bantuan logistic, dan pemulihan keadaan melalui program rehabilitasi da rekonstruksi

b) Program Penyiapan Peta Rawan Bencana.

Tujuan penyiapan Peta Rawan Bencana adalah untuk mengidentifikasi seluruh wilayah kabupaten Enrekang terhadap potensi terjadinya bencana agar dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi bencana, Sasaran Program ini meliputi Seluruh wilayah kota Bandar Lampung, khususnya pada daerah pesisir, lokasi jalan dan jembatan, daerah bantaran sungai rawan banjir, dan daerah permukiman yang rendah dan rawan banjir.

c) Program Penyiapan Prosedur Tetap (Protap).

Program ini menyiapkan serangkain aturan dan prosedur yang akan menjadi dasar bertindak didalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Protap yang diharap dapat dibuat antara lain Protap kerja Tim Reaksi Cepat, Komando, prosedur pemberian bantuan tanggap darurat bencana, protap Pusat Komando Pengendalian lapangan (Pusdalops), protap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sasaran Program ini ialah Pemerintah desa, Kelurahan, Kecamatan, BPBD, Pemda, DPRD, Unit kerja terkait, stakeholder penanggulangan bencana (TNI, Polri, LSM, PMI, Tagana)

d) Proram Diklat dan Simulasi Penanganan Bencana

Untuk penanganan bencana diperlukan keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang cukup serta pengenalan dengan macam dan jenis bencana serta cara penanganannya. Untuk itu diupayakan pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan mulai dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat sampai pada pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan simulasi bencana juga diharapkan dapat dilaksanakan dengan tujuan membangun kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana, masyarakat, dan para stakeholder agar mengenal dan memahami prosedur penanggulangan bencana, penyelamatan diri, keluarga, harta benda sampai pada tahap penanganan pengungsi dan penyaluran logistic darurat dan penanganan medis.

Sasaran dari program ini adalah Staff BPBD, para stakeholder penanggulangan bencana, aparat desa, Kelurahan, Kecamatan yang bertugas di posko siaga bencana, masyarakat, SKPD terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, LSM, PMI

2.) Program Sektor Tanggap Darurat dan Logistik

Meliputi:

a) Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

Meliputi program pemberian bantuan darurat sandang pangan, seperti makanan, minuman, pakaian, peralatan dapur, mandi, tempat berteduh dan pelayanan kesehatan. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana darurat untuk kelancaran aktivitas penanggulangan bencana saat keadaan darurat, seperti pembuatan jalan akses, pengamanan lokasi bencana dari bahaya susulan. Sasaran Program adalah daerah yang mengalami bencana, dan masyarakat yang tertimpa bencana

b) Program Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana

Berupa program untuk menyiapkan peralatan penanggulangan bencana bagi staff BPBD, Tim Reaksi Cepat, Tim Pusdalops, Posko Siaga Bencana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, pakaian dan tanda pengenal, peralatan pertolongan darurat, jaket pelampung, perahu karet, tenda komando, family, peralatan dapur, obat-obatan dll, sedangkan yang menjadi sasaran dari program ini adalah Staff BPBD, tim Reaksi Cepat, Relawan bencana, Posko Siaga Bencana di desa/Kelurahan/Kecamatan, korban bencana

c) Penyediaan Sarana Air Bersih

Program penyediaan sarana air bersih baik berupa pembangunan Instalasi Pengelohan Air (IPA) dan jaringan pipa air minum, pemasangan sambungan rumah, pembuatan bak air dll, dilaksanakan pada daerah-daerah atau desa/kota yang belum menikmati / tersentuh dengan program penyediaan sarana air bersih khususnya pada daerah dari kompleks, Maiwa dan ibukota kabupaten. Program ini mendukung pencapaian sasaran masyarakat yang sehat.

Sasaran dari program ini adalah Daerah yang belum menikmati fasilitas sarana air bersih.

d) Program Penataan dan Revitalisasi Bangunan Gedung, Niaga dan Pasar serta pembangunan Fasilitas Umum (Fasum) dan Olahraga.

Meliputi program penataan dan revitalisasi gedung niaga, pasar agar tercipta iklim yang kondusif dan aman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga mampu meningkatkan perputaran ekonomi daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat seperti pembangunan stadion mini, taman bermain, terminal, kawasan miniatur Enrekang sebagai wadah masyarakat dalam beraktifitas dan menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sasaran Program ini meliputi daerah-daerah sarana publik yang minim perawatan seperti di terminal, masjid dan pasar

3.) Program Monitoring Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan

Peningkatkan pelaksanaan monitoring, Evaluasi, pencatatan dan pelaporan hasil program dalam upaya menjawab dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan serta bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Meningkatkan rasa tanggung jawab pengelola program dalam membuat catatan, pelaporan dan pengiriman laporan yang benar kepada instransi terkait yang membutuhkan, serta tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Sasaran Programnya ialah para Pejabat fungsional (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), para Kasubdin, Kasie, pengelola dan penanggung jawab program di Dinas Pekerjaan Umum Kota

E. Kerangka Pikir

Permasalahan bencana alam khususnya bencana banjir merupakan masalah klasik yang terus timbul dan tak jarang menimbulkan kerugian ekonomi kerusakan fasilitas umum, hingga menelan korban jiwa. Bencana banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa banjir timbul jika air menggenangi daratan yang biasanya kering.

Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang tinggi. Akan tetapi, terkadang banjir juga terjadi karena ulah manusia sendiri yang kurang menjaga dan menyayangi alam semesta. Seperti penebangan hutan secara liar, serta pembuangan sampah

tidak pada tempatnya, yaitu disekitar aliran sungai atau kali yang menyebabkan sampah-sampah tersebut menjadi menumpuk, membuat aliran sungai menjadi tidak lancar dan akhirnya menyebabkan banjir.

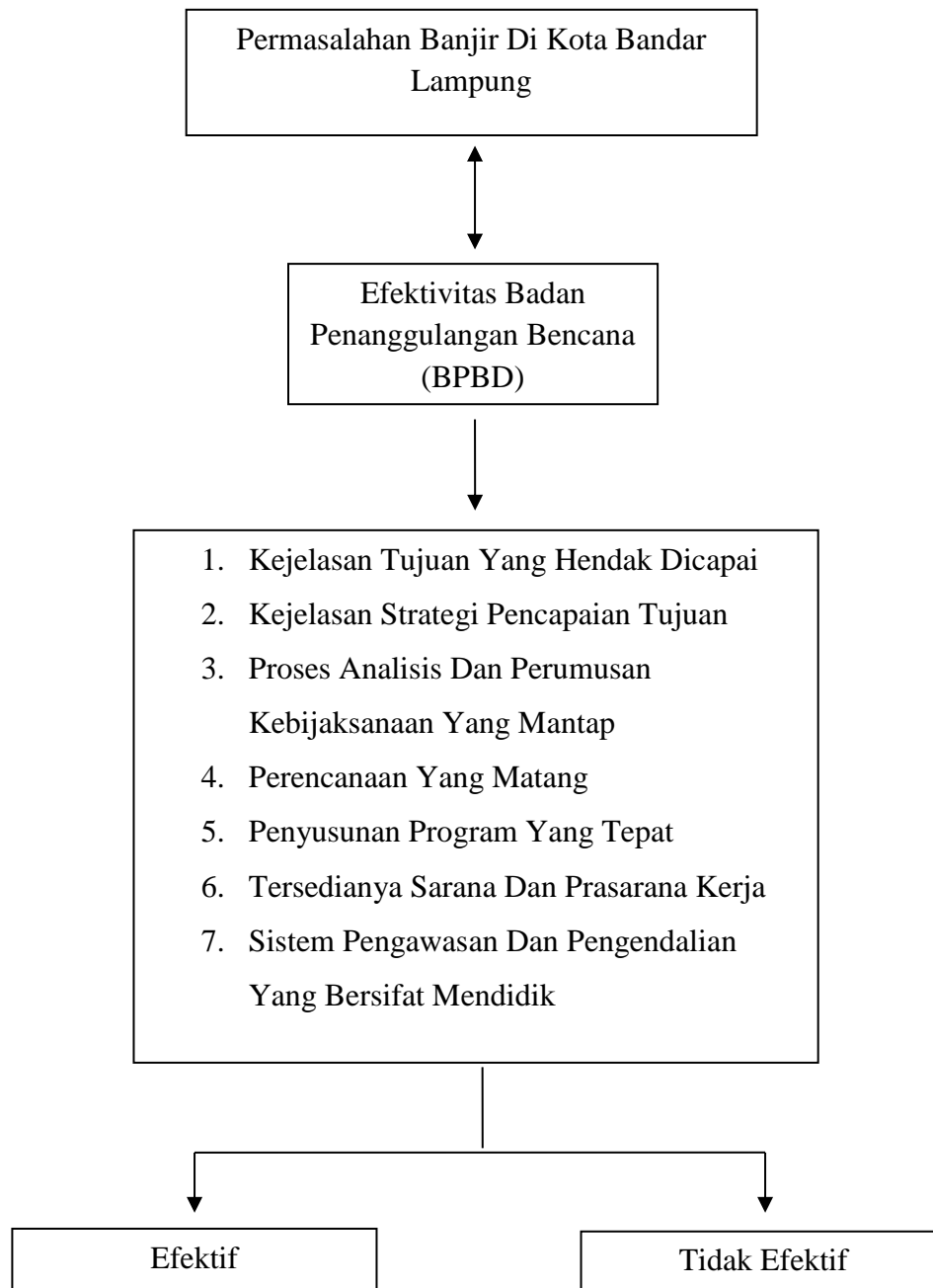
Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Kota besar yang ada di Indonesia tak juga luput dari bencana banjir, di awal tahun 2016 banjir bandang telah membuat ratusan rumah yang ada di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, serta Kelurahan Gedung Pakuon dan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung mengalami banjir yang menggenangi rumah masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, namun yang menjadi pokok permasalahan banjir kali ini adalah yang terparah semenjak 20 tahun terakhir, hal ini tentu saja menjadi masalah yang menarik untuk dibahas mengingat Kota Bandar Lampung saat ini sudah memiliki Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang bertugas untuk mengatasi bencana yang ada di Bandar Lampung termasuk bencana banjir.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2010 tentang Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, oleh karena itu BPBD seharusnya mempunyai sumber yang kuat mengenai tugas-tugas serta pedoman yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi banjir yang ada di Bandar Lampung.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas, penulis telah mengetahui apakah BPBD Bandar Lampung sudah dapat dikatakan efektif atau tidak melalui proses pengukuran Efektivitas menurut Siagian (1985: 33-35) sebagai berikut :

1. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai
2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan
3. Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan Yang Mantap
4. Perencanaan Yang Matang
5. Penyusunan Program Yang Tepat
6. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja
7. Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik

Satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pekerjaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam harus bekerja dengan disiplin, efisien dan efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yang ada di daerahnya. Untuk memudahkan memahami dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya, sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

M. Nazir (1998 : 63) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek serta kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang.

Nawawi (2001 : 63) mengartikan metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Selain itu Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2007:4) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan ialah berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan di lapangan, serta foto. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dianggap lebih relevan jika menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebab dengan menggambarkan atau melukiskan berbagai macam yang berkenaan dengan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bandar Lampung, akan diketahui sudah efektifkah suatu lembaga pemerintah dalam menangani bencana yang ada.

B. Fokus Penelitian

Penulis akan memfokuskan tentang Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas menurut Siagian (1985: 33-35), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, adanya tujuan yang jelas dan pasti yang telah ditetapkan dalam mencapai target dan tujuan, Indikator ini bermaksud dalam program BPBD adanya tujuan yang jelas dan pasti yang telah ditetapkan dalam mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, lembaga atau badan pemerintahan diharapkan memiliki strategi yang tepat dan jelas dalam melaksanakan

pemerintahan. Indikator ini bermaksud menjelaskan bagaimana peran dari BPBD Kota Bandar Lampung yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menangani bencana banjir sebab setiap bencana dan bahayanya yang timbul di Kota Bandar Lampung tidak lepas dari peran BPBD itu sendiri bagaimana cara kepala BPBD memimpin bawahannya.

3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, pemerintah diharapkan mampu melakukan proses analisa yang tepat dalam melihat kondisi dimasyarakatnya sehingga mampu merumuskan kebijakan yang matang dan sesuai dengan kondisi masyarakat, dalam hal ini pemerintah melalui BPBD hendaklah membuat kebijakan ataupun program kerja yang dibuat untuk mengantisipasi bencana banjir.
4. Perencanaan yang matang, perlu dibuat perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tidak merugikan kedua pihak, baik itu pihak masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, Indikator ini menunjukan proses dari perencanaan apakah sudah benar-benar matang atau siap sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu pihak masyarakat maupun pemerintah. Setiap kegiatan pastilah punya rancangan akan seperti apa kedepannya, dan bagaimana itu akan dilakukan sehingga perlu dibuat dahulu perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat, setelah adanya proses analisis yang tepat dan baik maka akan dibuatlah penyusunan program yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan melalui proses perencanaan yang tepat maka

akan menghasilkan penyusunan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakatnya;

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, selain mekanisme kerja yang matang dan tepat yang telah dijelaskan tadi perlu juga didukung dengan sarana dan pra sarana kerja yang baik guna menunjang kegiatan pemerintahan yang. Indikator ini menjelaskan selain mekanisme kerja yang matang dan tepat perlu juga didukung dengan sarana dan pra sarana kerja yang baik guna menunjang kegiatan pemerintahan yang baik, dalam hal ini apakah masyarakat ikut menyumbang atau membantu dan menambah bahan material - material dalam pengerjaan penanggulangan Bencana yang dilakukan. Pengerjaan yang dilakukan apakah dikerjakan dengan orang yang berkompeten dibidang itu;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Perlu adanya sistem pengawasan dan pengendalian dari pemerintahan daerah dan pemerintah pusat sehingga mampu memberikan kritik, saran dan informasi yang berguna dalam rangka pengawasan dan pengendalian BPBD Bandar Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di BPBD Bandar Lampung serta Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, yang merupakan daerah terparah dampak bencana banjir sejak 20 tahun

terakhir. serta di Kelurahan Kota Karang terdapat kampung tanggap bencana yang dibentuk langsung oleh BPBD Kota Bandar Lampung dan hanya ada 2 saja desa tanggap bencana ini yaitu di Kelurahan Kota Karang dan Kota Karang Baru.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dalam Burhan (2011: 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah, Subbag Umum dan Kepegawaian yang dalam hal ini diwakilkan oleh bawahannya langsung dan juga menjabat sebagai bendahara barang dan staf penyusunan program, lurah Kota Karang, Kepala lingkungan 2 Kelurahan Kota Karang serta Komandan Regu (DANRU) satu BPBD Bandar Lampung, yang masing masing informan sudah berpengalaman dengan banjir dan BPBD untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga dalam penelitian ini jumlah dari informan adalah 4 orang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, dapat berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian yang terdapat pada lokasi penelitian berupa. Data-data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa foto-foto kegiatan, proposal pengerjaan, laporan pertanggung jawaban, arsip, situs, dan sumber-sumber lain yang dapat diterima.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi syarat atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara tak berencana dan terbuka dimana narasumber atau informan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan secara bebas dengan harapan agar memperoleh

kejelasan dari sumber-sumber data yang belum dipahami oleh penulis, serta untuk memperoleh realita objek yang diteliti.

Wawancara merupakan instrumen kunci pada penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Subbag Umum dan Kepegawaian yang dalam hal ini diwakilkan oleh bawahannya langsung dan juga menjabat sebagai bendahara barang dan staf penyusunan program, lurah Kota Karang, Kepala lingkungan 2 Kelurahan Kota Karang serta Komandan Regu (DANRU) satu BPBD Bandar Lampung

Menurut Stewan dan Cash (Burhan, 2011: 64), wawancara adalah suatu proses komunikasi interaksional antara dua orang, setidaknya satu diantaranya memiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan biasanya melibatkan pemberian dan menjawab pertanyaan.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi. Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku stakeholder yang terlibat dalam Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip-arsip yang dimiliki oleh BPBD Kota Bandar Lampung, kemudian dari laporan status lingkungan hidup daerah Kota Bandar Lampung, dan peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan mengenai penanggulangan bencana, baik di pusat maupun daerah khususnya Kota Bandar Lampung, serta dari buku-buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan proses memeriksa data (editing) yang terkumpul guna memastikan kesempurnaan pengisian dari setiap instrumen pengumpulan data. Faisal (2010: 149) setelah data-data hasil penelitian dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah berupa pengolahan data. Menurut Arikunto (2010: 251) teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Pengeditan Data (*Editing*)

yaitu suatu tahap penyusunan data ke dalam bentuk kategori tertentu yang telah didapat atau diperoleh di lapangan, pengeditan dilakukan pada jawaban wawancara yang menggunakan bahasa sehari sehari menjadi kalimat yang lebih baku.

2. Interpretasi Data

yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data yang lain.

G. Teknik Analisis Data

Tahap Analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Selain itu analisis data dapat dilakukan pengujian guna mengetahui apakah pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis. Merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistis yang relevan untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011: 163).

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah difahami (Sugiyono, 2013: 88). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mengacu dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Memilih data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data kedua dengan menyusun data dalam satuan yang sejenis (Sugiyono, 2013: 92).

2. Penyajian Data

Merupakan suatu usaha untuk menampilkan informasi yang tersusun dalam pola sehingga mudah difahami. Penyajian data yang digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan menampilkan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya (Sugiyono, 2013: 95).

3. Verifikasi Data

Kegiatan yang ketiga adalah verifikasi data. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan validitasnya. Dalam melakukan verifikasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dimana untuk menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, kendati pasti menambah waktu dan biaya serta tenaga. Tetapi harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar-variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat

atau korelasi dari suatu masalah tertentu. Kedalaman pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif digunakan untuk memotret sesuatu fokus masalah secara komprehensif. Karena itu, memahami dan menjelaskan jelas merupakan dua wilayah yang jauh berbeda.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam menyimpulkan hasil analisis ini mengacu pada perspektif emik dan etik. Perspektif etik mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang menggambarkan klasifikasi dan fitur-fiturnya menurut temuan pengamat atau peneliti (*scientist's viewpoint*). Sementara emik mengacu pada sudut pandang suatu masyarakat dalam mempelajari dan memberi makna terhadap satu tindakan, atau membedakan dua tindakan (*native's viewpoint*). Perspektif emik adalah struktural yang berarti cara anggota kelompok budaya memandang dunianya, jadi melihat dan memandang dari sisi dirinya. (Moleong, 2007: 236).

IV. GAMBARAN UMUM

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sebelum terbentuk BNPB dan BPBD, Satuan Kerja yang bertanggung jawab akan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana adalah Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB), akan tetapi setelah terbentuk BNPB Bakornas PB dibubarkan.

Dampak dari dibubarkan Bakornas PB berimplikasi pada pembubaran rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB). BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga non-departemen setingkat menteri dan merupakan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana yang berada pada tingkat pusat atau nasional, sementara BPBD dibentuk Pemerintah Daerah dan merupakan lembaga yang menangani penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, termasuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Perda Nomor 5 Tahun 2010).

Pada tingkat provinsi, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau setingkat eselon Ib dan di tingkat Kabupaten/Kota, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon IIa. Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah Sekda.

Pembentukan BPBD diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, namun payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian pekerjaan, keanggotaan dan mekanismenya dan hal-hal terkait dengan susunan organisasi BPBD diatur oleh Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008.

Unsur Pengarah penanggulangan bencana pada BPBD berada di bawah Kepala BPBD. Tugas Pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana, sedangkan fungsinya adalah membuat rumusan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketua Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD,

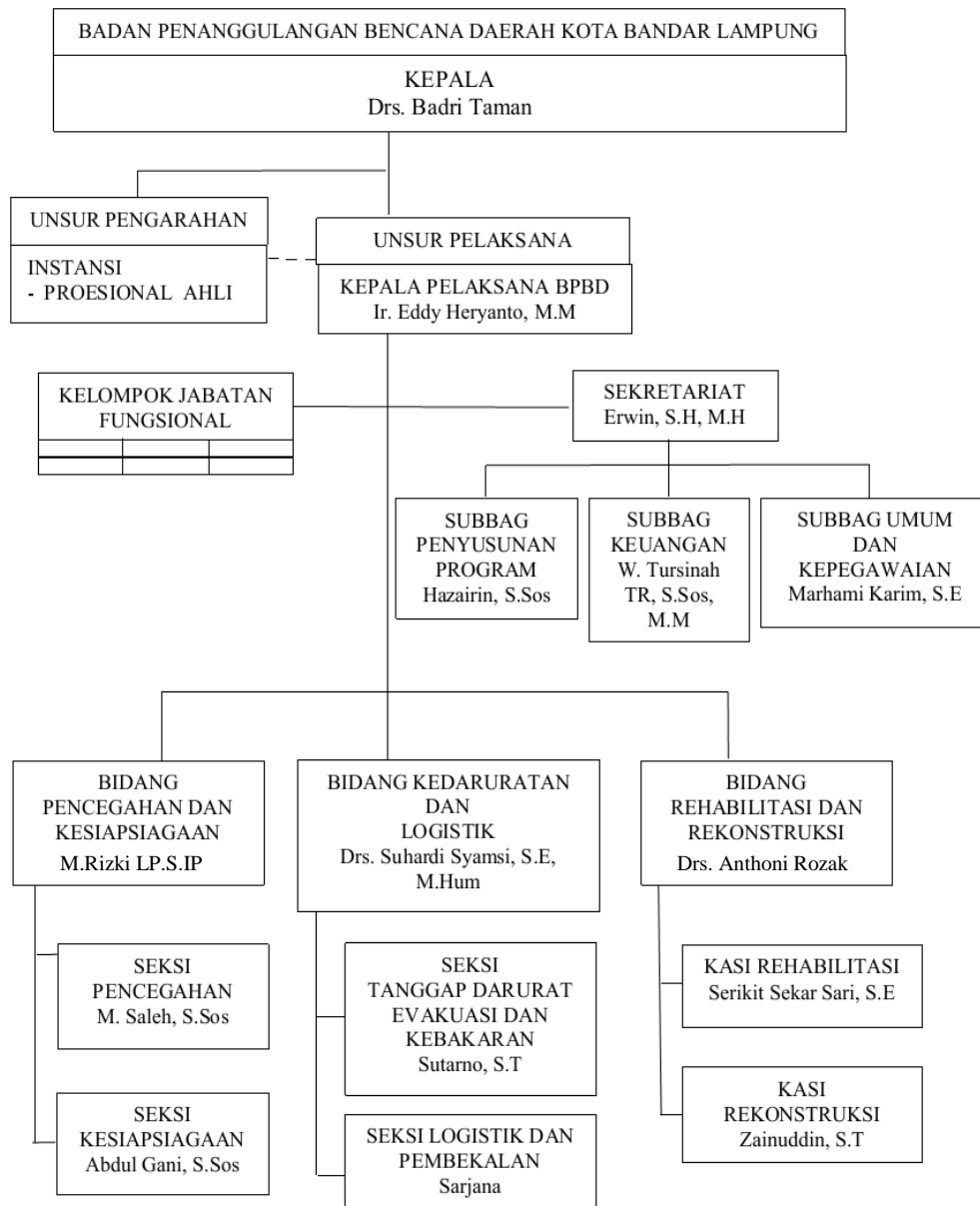
anggotanya berasal dari instansi pemerintah daerah, golongan profesional dan tokoh masyarakat (Perda Nomor 5 Tahun 2010). BPBD terdapat di hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kota Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 14.C Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. BPBD Kota Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung dan dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

Unsur pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala BPBD (Perda Nomor 5 Tahun 2010)

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Unsur Pelaksana BPBD adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010). Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi, dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
- b. Komando, dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan bencana, dilaksanakan secara terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan bencana Daerah;
- b. Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan. Hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan tugasnya, sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

- a. Seksi Pencegahan Bencana;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

- a. Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
- b. Seksi Logistik dan Perbekalan.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya. Sumber Daya Manusia atau pegawai yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penggerak utama dari pada seluruh kegiatan dan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari pegawai yang berstatus sebagai pejabat kepala badan, kepala bidang, kepala seksi, dan pegawai yang berstatus sebagai staf. Rincian jumlah seluruh pegawai atau SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Golongan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung (BPBD)

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	Gol. IV	5
2.	Gol. III	35
3.	Gol. II	61
4.	Gol. I	5
4.	Pegawai Kontrak	131
Jumlah		237

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sedangkan fungsi Unsur Pelaksana BPBD adalah melakukan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. Unsur Pelaksana BPBD ini dapat membentuk Satuan Tugas.

Jabatan Unsur Pelaksana BPBD diisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Perda Nomor 5

Tahun 2010 merupakan acuan utama dalam teknis pembentukan BPBD di Kota Bandar Lampung.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program yang dimiliki oleh BPBD secara efektif dan efisien perlu adanya dukungan dengan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan operasional lapangan, antara lain :
 - a. Mobil tangki berikut kelengkapannya,
 - b. Mobil pemadam tipe snorkel (sebagai pengganti mobil tangga)
 - c. Mobil komando,
 - d. Mobil *pick up*,
 - e. Mobil patrol,
 - f. Mobil *rescue*,
 - g. Motor roda 3 dan motor *rescue*,
 - h. Perahu karet dan mesin,
 - i. Tenda pleton, tenda regu,
 - j. Selang semprot, selang isap,
 - k. Mobil angkut pasukan (satgas),
 - l. Mobil pompa pengangkut air dan foam berikut dengan kelengkapannya seperti selang, kopleng, dan *nozzle*.

2. Peralatan teknik operasional, antara lain :
 - a. Peralatan pendobrakan, antara lain : kapak, dongkrak, mesin gergaji, mesin las, linggis, mesin chain saw, kompresor dan alat cat, selling dan rol, mesin pompa alkon, mesin pompa air, tali, genset, *life jacket*, *ring ball*, bor tangan/garenda, dan lain-lain,
 - b. Peralatan alat pemadam kebakaran dan kelengkapannya,
 - c. Peralatan penyelamatan (*rescue*) antara lain: alat pernapasan buatan, usungan dan kelengkapannya.

3. Sarana dan fasilitas perorangan, antara lain :
 - a. Pakaian dan sepatu tahan api,
 - b. Helmet (*helm*),
 - c. Alat pernapasan jinjing,
 - d. Peralatan komunikasi (sumber: BPBD Kota Bandar Lampung)

B. KOTA Bandar Lampung

1. Umum

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20 LS–5°30 LS dan 105°28 BT–105°37 BT. Ibukota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera (BPS, 2010: 41). Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

Letak tersebut berada di Teluk Lampung di bagian selatan Provinsi Lampung dan di ujung selatan Pulau Sumatera. Sedangkan Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan. (BPS, 2010: 41)

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20% dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0–40%. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0% diantaranya berada di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton.

Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40% diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentukan kelerengan di Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki luas 192,2 Km², dan luas perairan kurang lebih 39,82 Km² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran dan wilayahnya terletak pada ketinggian antara 0-700 m di atas permukaan laut dengan topografi sebagai berikut :

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung dan Panjang
- b. Daerah Perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara
- c. Daerah Daratan Tinggi serta sedikit bergelombang yaitu disekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Gerampok di bagian Timur Selatan

Sungai-sungai di Kota Bandar Lampung umumnya tidak terlalu panjang, antara 2-14 Km. Hulu sungai berada di bagian Barat dan daerah hilir pada bagian Selatan, yaitu pada dataran pantai.

2. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson (1951), iklim Bandar Lampung tipe A; sedangkan menurut zone agroklimat Oldeman (1978), tergolong Zone D3, yang berarti lembab sepanjang tahun. Curah hujan

berkisar antara 2.257 – 2.454 mm/tahun. Jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun. Kelembaban udara berkisar 60-85%, dan suhu udara 23-37 °C. Kecepatan angin berkisar 2,78-3,80 knot dengan arah dominan dari Barat (Nopember-Januari), Utara (Maret-Mei), Timur (Juni-Agustus), dan Selatan (September-Oktober).

Parameter iklim yang sangat relevan untuk perencanaan wilayah perkotaan adalah curah hujan maksimum, karena terkait langsung dengan kejadian banjir dan desain sistem drainase. Berdasarkan data selama 14 tahun yang tercatat di stasiun klimatologi Pahoman dan Sumur Putri (Kecamatan Teluk Betung Utara), dan Sukamaju Kubang (Kecamatan Panjang), curah hujan maksimum terjadi antara bulan Desember sampai dengan April, dan dapat mencapai 185 mm/hari (Wikipedia.org)

C. Kelurahan Kota Karang

Kota karang adalah kelurahan yang berada di kecamatan teluk betung timur kota Bandar Lampung, sebelum kecamatan teluk betung timur terbentuk, kelurahan ini berada di kecamatan teluk betung barat. Kemudian pada tahun 2012 tepatnya tanggal 17 september 2012 Kelurahan Kota Karang dimekarkan menjadi dua kelurahan, yaitu Kota Karang dan Kota Karang Raya, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung

1. Luas dan batas wilayah

Luas dari kelurahan kota karang adalah seluas 35 Ha dengan batas

wilayah Sebagai Berikut:

- a. Sebelah Utara : Way Belau/ kelurahan Pesawahan
- b. Sebelah Selatan : Jl Teluk Ratai/ Kelurahan Kota Karang Raya
- c. Sebelah Barat : Jl laksamana RE Martadinata/ Kelurahan Perwata
- d. Sebelah Timur : Laut/ Teluk Lampung

2. Jumlah Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari profil Kelurahan Kota Karang pada akhir tahun 2016, jumlah penduduk yang bermukim di Kota Karang berjumlah 10.367 jiwa. Sedangkan menurut jenis kelamin jumlah penduduknya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Kota Karang Tahun 2016

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah penduduk	10.367 Orang/ Jiwa
2	Jumlah laki-laki	5.231 Orang/ Jiwa
3	Jumlah Perempuan	5.136 Orang/ Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	2.650 KK

Sumber : Arsip Kelurahan Kota karang

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Bandar Lampung dilihat dari 7 indikator penilaian efektivitas yaitu Kejelasan tujuan yang hendak di capai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya Sarana Dan Prasarana serta Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik. Sudah dapat dikatakan Efektif. Berikut akandisajikan penjabaran seberapa efektifnya BPBD dalam menanggulangi bencana banjir.

1. Program yang dapat dan telah di realisasikan dalam upaya menjalankan visi-misi BPBD masih sedikit dikarenakan jumlah anggaran yang diterima oleh BPBD terbatas jumlahnya.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, serta dalam penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

3. BPBD Kota Bandar Lampung sudah responsif terhadap situasi serta target yang dicapai dengan kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung. Kemudian dari segi tanggung jawab BPBD Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam kegiatan penanggulangan bencana.
4. Dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana banjir, BPBD terlebih dahulu melakukan survey ke lokasi tempat terjadinya banjir dan yang meninjau ke lokasi agar peralatan yang dibawa dapat digunakan dengan efektif..
5. Untuk menghadapi kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berubah-ubah, sesuai dengan kondisi yang ada, maka dibuatlah sebuah Rencana dan Strategi (Renstra) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Bandar Lampung masih terdapat beberapa peralatan yang dalam keadaan rusak ataupun hilang bahkan dalam kondisi 50 % kebawah yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dari BPBD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung.
7. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat juga selalu tanggap dalam menyikapi imbauan dari pemerintah seperti peringatan prabencana dan keikutsertaan dalam kegiatan Desa tanggap Bencana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran berupa:

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar tetap konsisten menjaga prinsip badan penanggulangan bencana dan untuk pemerintah pusat maupun daerah diharapkan memberikan perhatian lebih dan mendukung penuh segala kegiatan BPBD agar semua rencana kegiatan yang telah dibuat dapat teralisasi semua.
2. Untuk Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh kepala BPBD sudah cukup baik kinerjanya.
3. Kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat memberikan anggaran lebih kepada BPBD Provinsi Lampung dan BPBD Kabupaten/Kota, mengingat masih Minimnya serta tua nya sarana dan prasarana yang ada di BPBD kota Bandar Lampung.
4. Untuk BPBD Sebaiknya dibuatkan perencanaan yang benar-benar sesuai anggaran sehingga walaupun kegiatan ataupun program kerja yang dibuat

sedikit, asal sesuai anggaran sehingga kegiatan tadi dapat lebih difokuskan dan lebih maksimal lagi.

5. Perlunya pemerataan pelatihan dan sosialisasi kepada setiap perwakilan dari masing-masing Kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana. sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakatnya.
6. Perlunya perawatan intensif untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada lagi peralatan penanggulangan bencana dalam keadaan rusak ataupun hilang sehingga kegiatan penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung dapat berjalannya lancar.
7. Untuk di indikator pengawasan, sebaiknya ditingkatkan lagi dan dibentuk unsur pengarah atau masyarakat ahli sesuai dengan bagan struktur organisasi BPBD Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abhas. 2012. *Manajemen Bencana*. Bina Aksara. Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta

Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta

Harbani Pasolong, 2007. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

Hasibuan, Malayu.S.P. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press

IDEP, 2007. *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Edisi ke-2, Bali : Yayasan IDEP.

Kaswan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta

Mangkunegara, A.P 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. PT Refika Aditama, Bandung

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Noor, Juliansyah, 2011. *Metode Penelitian*. Kencana: Jakarta
- Nurjanna, Dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Alfabeta: Bandung
- Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat: Jakarta
- Richard H. Hall. 2006. *Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses*. Amara Books, Yogyakarta
- Robbins, P.Stephen. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Safiie, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju : Bandung
- Siagian, P.Sondang. 1985. *Manajemen Modern*. Jakarta : Gunung Agung.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta
- Siagian, P.Sondang. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Sinambela Poltak, Lijan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali: Jakarta
- Steers, Richard M. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. R&D. Alfabeta: Bandung

Sulistio, Eko B. dan Budi, Waspada K. 2009. *Birokrasi Publik Perspekti Ilmu Administrasi Publik*. STISIPOL, Dharma Wacana Metro

Wibowo. 2007. *Manajemen Perubahan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Dokumen

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

Basyar, Abdul Hakim. 2002. Majalah PP, (online),

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K7Hb6CyM1cJ:www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10676/2392/+&cd=1&hl=en&ct=clnk diakses 26 November 2014)

<http://Lampung.tribunnews.com/2016/03/15/foto-banjir-bandang-terjang-Bandar-Lampung-ribuan-rumah-warga-terendam-air> diakses tanggal 21 agustus 2016 pukul 13.00

<http://www.duajurai.com/2016/06/hujan-deras-air-semata-kaki-rendam-rumah-warga-jalan-sultan-haji-Bandar-Lampung/> diakses tanggal 21 agustus 2016 pukul 13.00

- Kaufman & Rasyid. 2011. Tugas dan Fungsi Pemerintah, (online),
(<http://2frameit.blogspot.com/2011/11/tugasdanfungsipemerintah.html>)
- Paripurno, Eko Teguh. 2011 Panduan Pengelolaan Risiko Bencana berbasis Komunitas PRBBK, (online),
(https://www.academia.edu/5825822/Panduan_Pengelollan_Risiko_Bencana_berbasis_Komunitas_PRBBK)
- Ramdhani, Nurfitri. 2013. Kebijakan Lingkungan Hidup, (online),
(<http://nurfitriramdhani.blogspot.com/2013/06/kebijakan-lingkungan-hidup.html>)
- Starawaji. (2009). Efektivitas Pembelajaran [Online]. Tersedia:
(<http://starawaji.wordpress.com./2009/03/01/efektivitaspembelajaran/html>). Diunduh 18 Agustus 2016 pukul 11:2)
- Supriyatna, Yayat. 2007. Analisis Dampak Bencana terhadap Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE., (online),
(<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285082T29478Analisis%20dampak.pdf>). Diunduh 18 Agustus 2016 pukul 11:5)
- Tali,Tali. 2011. Disaster Management Training Program Review UNDP : Tinjauan Umum Manajemen Bencana Edisi 2, (online),
(<https://www.scribd.com/doc/66245834/Disaster-Management-Training-Program-Review-UNDP>)